

**KAJIAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS PENGADAAN
ALUTSISTA TENTARA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(Studi Putusan Nomor 363K/MIL/2017)**

AMELIA FARISSA DEVI

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, atas kerugian negara dari penyalahgunaan kewenangannya dalam pengadaan alusista TNI. Dan untuk mengetahui pertimbangan hakim militer dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi Teddy Hernayadi, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Asas Pertanggung Jawaban dan Teori Kesalahan Dalam Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan alusista TNI pada studi Putusan Nomor 363 K/MIL/2017 telah dilakukan melalui sistem memadukan sistem peradilan pidana umum dengan sebagian sistem peradilan militer, khususnya pada proses penyidikan oleh pejabat penyidik yang berlaku sekarang. Dengan melibatkan peran Komandan selaku Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) dan melibatkan Perwira Penyerah Perkara (Papera) sebagai bagian dari sistem. Kendala yang ada dalam proses ini adalah dalam hal pelimpahan perkara oleh Kejaksaan sebagai penuntut umum ke pengadilan, harus dengan surat keputusan dari Perwira Penyerah Perkara (Skeppera), kemudian diajukan pada tingkat banding hingga kasasi di Mahkamah Agung. Dasar pertimbangan hakim militer dalam penjatuhan pidana bagi pelaku pidana korupsi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia pada studi Putusan Nomor 363 K/MIL/2017 adalah berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan yang melekat pada Terdakwa sebagai Mabidiakbia Pusku Kementerian Pertahanan RI, serta merangkap sebagai Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dimana perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara, Pasal 10 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan TNI.

**STUDY ON CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION ON THE PROCUREMENT
OF ALUTSISTA OF THE NATIONAL ARMY OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA**

(Study of Decision Number 363K / MIL / 2017)

AMELIA FARISSA DEVI

ABSTRACT

This research was conducted to find out the form of criminal responsibility of the perpetrators of criminal acts of corruption committed by officials in the Indonesian National Armed Forces, for state losses from misuse of their authority in procuring alusista TNI. And to find out the consideration of military judges in the imposition of criminal sanctions for the perpetrators of corruption, Teddy Hernayadi, who has permanent legal force.

The theory used in this study is the Principle of Responsibility Principle and Theory of Mistakes in Criminal Law. The research method used in this thesis is a normative juridical and empirical juridical approach.

The normative juridical approach is carried out to understand the problem by remaining or relying on the field or legal studies, while the empirical juridical approach is carried out to obtain clarity and understanding of research problems based on existing realities.

The results of this study conclude that criminal liability imposed by judges on perpetrators of corruption who commit abuse of authority in procuring alusista TNI in the study of Decision Number 363 K / MIL / 2017 has been carried out through a system of integrating the general criminal justice system with a part of the military justice system, especially in the investigation process by investigating officials in force now. By involving the role of the Commander as the Supervisor who has the right to punish (Ankum) and involving the officer in the case surrender (Papera) as part of the system. Constraints in this process are in the case of delegation of cases by the Prosecutor as a public prosecutor to the court, must be a decree from the Dispatching Officers (Skeppera), then submitted to the appeal level to appeal at the Supreme Court. The basic consideration of military judges in criminal prosecution for perpetrators of corruption in the environment of the Indonesian National Army in the study of Decision Number 363 K / MIL / 2017 is related to abuse of position attached to the Defendant as Mabidiakbia Pusku Ministry of Defense, and concurrently as Special Treasurer of Bialugri (Foreign Exchange) Pusku Ministry of Defense of the Republic of Indonesia where the Defendant's actions contradict Article 3 Paragraph (1) of Law Number 17 Year 2014 concerning State Finance, Article 10 Paragraph (5) Law Number 1 Year 2004 concerning State Treasury, and Joint Ministerial Regulations Finance of the Republic of Indonesia and Minister of Defense of the Republic of Indonesia Number 67 / PMK.05 / 2013 and Number 15 of 2013 dated March 27, 2013 concerning the State Budget Implementation Mechanism within the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia and the TNI.